

IMPLEMENTASI *PROFIT SHARING* PADA MASYARAKAT NELAYAN DI  
DESA CAMPUREJO PANCENG GRESIK DITINJAU DARI *AKAD*  
*MUDĀRABAH*

SKRIPSI

Oleh:

YUSNI KARINI IKHSAN

NIM: G04216083



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2020

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yusni Karini Ikhsan

NIM : G04216083

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi *Profit Sharing* pada Masyarakat Nelayan di Desa

Campurejo Panceng Gresik Ditinjau dari Akad *Mudārabah*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Yusni Karini Ikhsan  
NIM. G04216083

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Yusni Karini Ikhsan NIM. G04216083 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Januari 2020

Pembimbing,



**Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I**  
NIP. 197510162002121001

## PENGESAHAN

Proposal skripsi yang ditulis oleh Yusni Karini Ikhsan NIM. G04216083 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 17 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



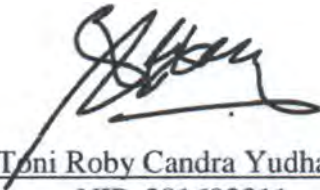
Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I  
NIP. 197510162002121001

Penguji II



Abdul Hakim, M.EI  
NIP. 197008042005011003

Penguji III



Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI  
NIP. 201603311

Penguji IV



Andhy Permadi, M.Kom  
NIP. 198110142014031002

Surabaya, 20 Maret 2020


Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Dr. H. M. Ali Arifin, MM.  
NIP. 1962121411993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yusni Karini Ikhsan  
NIM : G04216083  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail address : yusnikariniikhsan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Implementasi *Profit Sharing* Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Campurejo**

**Panceng Gresik Ditinjau Dari *Akad Muḍārabah***

---

---

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 September 2020

Penulis

(Yusni Karini Ikhsan)























seorang nelayan juga perlu menyiapkan bekal. Menjadi seorang nelayan membutuhkan modal yang banyak. Dan tidak semua orang mampu.

Untuk itu para nelayan memilih untuk bekerjasama untuk melaut, mengingat modal yang dibutuhkan cukup banyak. Jadi orang yang mampu memenuhi semua modal untuk melaut, mulai dari perahu, mesin sampai bekal melaut, mengajak orang yang memiliki kemampuan yang baik untuk menangkap ikan untuk bekerjasama sebagai nelayan dan menjalankan usaha penangkapan ikan. Bekerja sebagai nelayan dibutuhkan kerjasama kelompok yang baik. Dalam satu perahu biasa terdiri dari nelayan pemilik kapal yang biasa disebut dengan *juragan* dan nelayan anak buah yang biasa disebut *belah*. Untuk pembagian pekerjaan/tugas disesuaikan dengan keahlian masing-masing anggota, seperti bagian kemudi, bagian penarik jaring, bagian mesin dan lainnya. Dalam satu bulan para nelayan biasa menghabiskan waktu 25 hari kerja untuk melaut, dengan hari libur pada setiap hari Kamis atau lebih tepatnya malam Jum'at. Hasil tangkapan akan dijual oleh *juragan* kepada para tengkulak ikan langganannya.

Hasil tangkapan yang diperoleh setiap harinya pasti fluktuatif, untuk itu tidak ada gaji/upah yang pasti didapat oleh para nelayan, karena para nelayan biasa menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu *juragan* dan *belah*. Dulunya para nelayan di Desa Campurejo pernah menggunakan sistem bagi hasil lokal yang lama dengan membaginya menjadi tiga bagian. Hasil tangkapan nelayan akan dibagi menjadi tiga bagian, dimana bagian pertama untuk perahu, bagian kedua













digunakan para nelayan, jam kerja nelayan dan pengalaman kerja terhadap hasil yang didapatkannya. Rata-rata pendapatan nelayan di koto Tangah per bulan yaitu Rp. 3.400.000 (tertinggi) dan Rp. 540.000 (terendah). Untuk modal yang digunakan nelayan rata-rata Rp. 3.780.000. Lama bekerja nelayan sekitar 33 jam per bulan. Dan rata-rata nelayan di Koto Tangah mempunyai pengalaman kerja 17 tahun. Nelayan di Kota Padang khususnya nelayan yang berada di Kecamatan Koto Tangah berharap agar pemerintah mendirikan sebuah koperasi bagi nelayan untuk memberikan kemudahan bagi nelayan dalam mendapatkan modal untuk melaut dan menutupi biaya kebutuhan hidup jika nelayan tidak memperoleh hasil tangkapan yang optimal.<sup>8</sup> Penelitian ini tidak terkait sama sekali dengan sistem ekonomi Islam.

Neneng Nurhasanah, dalam jurnal Vol. 12 No. 3 (2010) dengan judul “Optimalisasi Peran *Muḍārabah* Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *muḍārabah* dalam memberdayakan ekonomi syariah terlihat dari karakteristiknya yang adil, seimbang, dan menekankan pada prestasi baik berua kerja maupun risiko yang ditanggung. Semakin tinggi prestasi kerja *muḍārib* dan semakin tinggi risiko yang ditanggung *sāhibul māl*, maka semakin tinggi pula perolehan keuntungan yang akan diperoleh. Dengan demikian *muḍārabah* mendorong masyarakat untuk *fāstabiqūl khairāt* (berlomba-lomba dalam prestasi). Tidak hanya mengharapkan keuntungan

---

<sup>8</sup> Lovelly Dwindah Dahan, “Analisis Pendapatan Nelayan Pemilik Payang di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”, Jurnal, Vol. 5 No. 1 (2016).



dengan onggang-onggang kaki menunggu datangnya laba/tambahan tanpa usaha yang maksimal. Perlu optimalisasi peran *muḍārabah* dalam kehidupan muamalah terutama di lembaga keuangan syariah enggan mengantisipasi kendala-kendala yang pada dalam akad ini. Di antaranya melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat *muḍārabah*, penyempurnaan regulasi yang terus menerus oleh pihak terkait, seperti lembaga-lebaga keuangan syariah, MUI, akademisi dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan penerapan *muḍārabah* dalam bermuamalah.<sup>9</sup>

Umrotul Khasanah, dalam jurnal Vol. 1 No. 2 (2010) dengan judul “Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terserapnya nilai-nilai Islam dalam tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia tidak terlepas dari strategi taktik Wali Songo dalam mengaktualisasikan ajaran Islam yang memakai pendekatan budaya akulturasi. Para ulama perintis Islam di bumi nusantara itu, sesungguhnya meniru cara dan proses dakwah Rasulullah Muhammad SAW dalam berekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah *muḍārabah*. Sistem *muḍārabah* sudah banyak dipraktikkan di Indonesia walaupun istilah yang dipakai menggunakan bahasa lokal seperti Jawa dan Madura. Sistem bagi hasil dari inovasi ulama dalam kenyataannya telah meningkatkan kesejahteraan umat, mengurangi jumlah masyarakat miskin dan mengikis kesenjangan yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Jadi pada intinya

---

<sup>9</sup> Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran *Muḍārabah* Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, Jurnal, Vol. 12 No. 3 (2010).







tinggi. Kondisi tersebut membuat nelayan buruh harus bekerja keras untuk dapat melunasi semua hutangnya kepada bos yang semakin bertumpuk setiap harinya.<sup>12</sup>

Trischa Relanda Putra, dalam jurnal Vol. 12 No. 2 (2017) dengan judul “Analisis Upah Sistem Bagi Hasil Anak Buah Kapal pada Perahu Penangkap Ikan di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Perahu Jenis Ijon-Ijon Payangan pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan Brondong dan Kelurahan Belimbing)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil perahu ukuran besar dilakukan setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan dan dikurangi biaya melaut. Bila pendapatan sudah dipotong, maka pembagian baru dapat dibagi sesuai kesepakatan awal. Persentase pembagian upah melalui sistem bagi hasil yang sudah diterapkan yaitu rata-rata ABK mendapat  $\geq 40\%$  dari total pendapatan bersih, namun pendapatan ABK masih dibawah UMK Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dan jam kerja masih di atas 8 jam tanpa ada besaran kompensasi secara pasti, sebagai kompensasi masyarakat nelayan memiliki kearifan lokal dalam bentuk uang jaban dan kacer.<sup>13</sup>

Pembahasan di atas telah memaparkan mengenai penelitian yang sebelumnya, dari kajian terdahulu penulis dapat mengemukakan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis

---

<sup>12</sup> Wilson M.A. Therik, “Nelayan dalam Bayang Juragan Potret Kehidupan Nelayan Tradisional Bajo di Tanjung Pasir Pulau Rote Nusa Tenggara Timur”, Jurnal, Vol. 2 No. 1 (2008).

<sup>13</sup> Trischa Relanda Putra, “Analisis Upah Sistem Bagi Hasil Anak Buah Kapal pada Perahu Penangkap Ikan di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Perahu Jenis Ijon-Ijon Payangan pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan Brondong dan Kelurahan Belimbing)”, Jurnal, Vol. 12 No. 2 (2017).



## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi para praktisi dan teoritis dalam penerapan sistem bagi hasil pada kerjasama ekonomi syariah dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian memberikan inspirasi dan motivasi kepada pelaksana untuk pengembangan ekonomi syariah.

### H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan uraian batasan variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian. Sehingga dapat disimpulkan variabel, meliputi:

#### 1. *Muḍārabah*

Menurut teknisnya *muḍārabah* dapat diartikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sāhibul mā*) menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak lainnya akan menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena























Bab Ketiga deskripsi hasil, pada bab ini penulis menjelaskan narasi tentang hasil penelitian penulis tentang gambaran umum Desa Campurejo Panceng Gresik.

Bab Keempat analisis data, pada bab ini penulis menguraikan tentang analisis implementasi sistem bagi hasil *profit sharing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Campurejo dan menganalisis sistem bagi hasil *profit sharing* yang dilakukan masyarakat nelayan Desa Campurejo ditinjau dari sistem bagi hasil *muḍārabah*.

Bab Kelima penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutupan yang meliputi kesimpulan dalam penelitian dan saran penulis.



















































peraturan tertentu yang persentasenya berbeda-beda antara *juragan* yang lainnya setelah dikurangi dengan biaya produksi.

Pada dasarnya, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi. Dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Dalam masyarakat pertanian, nelayan buruh identik dengan buruh tani. Secara kuantitatif, jumlah nelayan buruh di suatu desa nelayan lebih besar dibandingkan dengan nelayan pemilik.

Kedua, ditinjau dari skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya.

Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan





















menjaga dan melestarikan tradisi serta untuk mengeratkan tali silaturahmi antar sesama. Masyarakat nelayan di sana juga masih berpegang teguh pada agama yang dianutnya. Semua masyarakat nelayan di sana merupakan seorang muslim. Mereka memilih hari Jum'at atau malam Kamis sebagai hari libur untuk melaut agar bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jum'at. Kegiatan sosial keagamaan juga rutin dilakukan seperti: khotmil Qur'an, tadarus saat Ramadhan, dan peringatan hari besar Islam. Bahkan masyarakat nelayan Desa Campurejo juga membangun mushollah di dekat laut sana, agar bisa dimanfaatkan masyarakat untuk beribadah.

Mayoritas masyarakat nelayan di Desa Campurejo merupakan nelayan tradisional, mereka masih menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana untuk melaut. Ukuran perahu yang digunakan juga masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan nelayan modern, hanya memuat 2-6 orang saja. Masyarakat nelayan di sana juga belum semuanya memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada karena keterbatasan modal, meskipun ada beberapa nelayan yang sudah memanfaatkannya. Peralatan yang canggih dapat menunjang untuk memaksimalkan tangkapan saat melaut.

Tidak semua masyarakat nelayan di Desa Campurejo bisa memiliki perahu sendiri, mengingat pembuatan perahu memerlukan biaya yang cukup banyak. Selain memerlukan modal yang banyak



untuk membuat perahu, memiliki perahu juga mengandung resiko yang tinggi, seperti kerusakan mesin, dan belum tentu hasil melaut yang didapat sesuai yang diharapkan. Untuk itu beberapa masyarakat nelayan di Desa Campurejo memilih untuk menjadi nelayan anak buah, dari pada membuat perahu sendiri. Di Desa Campurejo hanya ada 198 perahu, padahal jumlah nelayan di sana mencapai 1.142 orang. Jumlah nelayan anak buah di Desa Campurejo lebih dominan dibandingkan dengan jumlah nelayan pemilik perahu, satu orang nelayan pemilik perahu biasa bekerjasama dengan 1-5 orang nelayan anak buah.

Dilihat dari segi kepemilikan modal, masyarakat nelayan di Desa Campurejo terbagi menjadi dua kelompok nelayan, yaitu nelayan pemilik perahu dan nelayan anak buah.

a. Nelayan pemilik perahu (*juragan*)

Nelayan pemilik perahu atau biasa disebut "*juragan*" merupakan nelayan yang memiliki modal perahu, mesin, dan alat tangkap. Saat melaut *juragan* juga yang memberi modal untuk biaya pembekalannya. Menjadi nelayan *juragan* memang membutuhkan modal yang besar dan memiliki resiko yang besar pula, akan tetapi pendapatan yang didapatkan juga lebih besar dari pada pendapatan nelayan anak buah.

b. Nelayan anak buah (*belah*)

Nelayan anak buah biasa disebut dengan "*belah*" merupakan nelayan yang hanya bermodalkan tenaga dan kemampuan



mengoperasikan alat tangkap untuk mencari ikan. *Belah* memilih untuk bekerjasama dengan *juragan* untuk melaut, karena tidak memiliki perahu dan alat tangkapnya sendiri. Banyak yang memilih untuk menjadi nelayan *belah* karena resiko yang minim dan tidak perlu mengeluarkan modal untuk pembekalan melaut. Hasil yang didapatkan oleh nelayan *belah* tidak sebanyak yang didapatkan nelayan *juragan* .

Masyarakat nelayan Desa Campurejo mayoritas menangkap ikan dengan *one day fishing* yakni metode menangkap ikan yang beroperasi secara harian. Nelayan biasa melaut selama 10-14 jam dalam sehari, berangkat melaut malam hari dan pulang melaut siang hari, atau berangkat pagi hari pulang sore hari.

Dalam usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan Desa Campurejo tidak bisa ditentukan waktunya secara pasti. Waktu melaut sangat bergantung dengan kondisi alam, nelayan harus menyesuaikan waktu melautnya dengan melihat kondisi alam terlebih dahulu. Jika saat malam hari ombak besar disertai dengan angin, maka nelayan akan memutuskan untuk melaut keesokan harinya. Akan tetapi jika keesokan harinya kondisi alam tetap sama, maka mereka memutuskan untuk tidak melaut hari itu. Pihak Dinas Perhubungan Gresik juga sudah memberikan himbauan untuk mematuhi keselamatan saat melaut.





















Nelayan biasa melaut dari hari sabtu sampai minggu, hari jum'at menjadi hari libur bagi nelayan Desa Campurejo. Pada saat malam hari para nelayan mulai berangkat melaut dan kembali besoknya di saat siang hari. Ada juga yang melakukan sebaliknya, berangkat melaut disiang hari dan kembali saat malam hari.

Cara pembagian laba atau bagi hasil yang dilakukan oleh Juragan dan Belah menggunakan sistem profit sharing, dengan melakukan pembagian hasil bersih yang didapatkan dari melaut, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya modal untuk melaut, kemudian dibagi dua antara *juragan* dan *belah* 50%:50% atau 40%:60%. Perbedaan persentase pembagian hasil ini dikarenakan kebijakan masing-masing *juragan*. *Juragan* yang memakai nisbah 40%:60% yakni *juragan* yang biasanya sering mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Jadi meskipun bagian yang didapatkan oleh nelayan *belah* hanya 40%, pendapatan itu tidak lebih sedikit dari yang didapatkan oleh nelayan *belah* lainnya yang memakai nisbah 50%:50%.

*Profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Keuntungan yang dapat didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurang biaya-biaya dan nol artinya antara pendapatan dan

biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*. Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misal karena mudharib lalai atau melanggar persyaratan kontrak pembiayaan, maka shahibul maal tidak perlu menanggung kerugian tersebut. Mudharib tersebut harus menanggung kerugian pembiayaan sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.

Adapun yang terjadi dilapangan, sistem *profit sharing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo yakni modal awal yang digunakan untuk melaut atau biasa disebut dengan pembekalan dan perawatan akan disediakan oleh *juragan*. Adapun biaya pembekalan yang dikeluarkan *juragan* untuk melaut yang meliputi:

1. Solar
2. Oli
3. Es Batu
4. Rokok
5. Makanan ringan

Dalam sekali melaut bisa menghabiskan 8 liter solar, dengan harga Rp.9.500/liter. Untuk oli biasa menghabiskan 1 liter per hari, dengan harga

Rp.70.000/liter. Es batu biasa memakai 3 es balok, dengan harga Rp.21.000/balok. Rokok biasa menyediakan 2 bungkus rokok, dengan harga Rp. 25.000/bungkus. Dan untuk makanan ringan biasa menghabiskan Rp. 38.000. Biaya pembekalan untuk melaut dapat berubah setiap harinya. Hal tersebut dilakukan karena menyesuaikan jumlah nelayan dan kondisi alam. Jika jumlah nelayan yang ikut melaut lebih sedikit makan biaya pembekalan yang dikeluarkan juga akan lebih sedikit. Saat musim baratan atau angin kencang maka biaya pembekalan juga menjadi lebih sedikit, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.

Untuk perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pembekalan untuk melaut dan dipotong 10% untuk biaya perawatan. Setelah pulang melaut, hasil tangkapan melaut yang diperoleh nelayan akan dilelang oleh *juragan* di TPI Campurejo pada pemborong. Setelah itu uang hasil penjualan akan dipotong terlebih dahulu untuk keperluan yang digunakan saat melaut, yaitu pembekalan yang sudah disebutkan di atas, dan dipotong sebesar 10% untuk biaya perawatan. Setelah didapatkan hasil bersih, kemudian dibagi untuk kedua pihak, bisa 50:50 untuk pihak *juragan* 50% dan untuk pihak *belah* 50% atau 40:60 untuk pihak *belah* 40% dan untuk pihak *juragan* 60%. Bagian yang diperoleh pihak *belah* kemudian dibagi lagi sesuai dengan jumlah *belah* yang ikut melaut saat itu.

Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian dilapangan, masyarakat nelayan di Desa Campurejo menggunakan sistem bagi hasil











Tidak semua nelayan menggunakan nisbah 50:50, ada juga yang menggunakan nisbah 40:60 maka untuk *Belah* 40% dan untuk *Juragan* 60%. Pihak *Juragan* memperoleh Rp. 918.000 dan pihak *Belah* memperoleh Rp. 612.000. Hasil yang diperoleh pihak *Belah* kemudian dibagi sesuai dengan jumlah *Belah* yang ikut melaut saat itu, yaitu 4 orang. Jadi setiap *Belah* memperoleh Rp. 153.000.

Jadi implementasi *profit sharing* pada masyarakat nelayan yang ada di Desa Campurejo sudah sesuai dengan teori *profit sharing*. Dimana pembagian hasil dilakukan setelah didapatkan hasil bersih. Hasil bersih tersebut didapatkan setelah dikurangi dengan biaya pembekalan dan perawatan. Kemudian baru dibagi sesuai persentase yakni 50%:50% atau 60%:40% sesuai kesepakatan keduanya. Jika terjadi kerugian, sepenuhnya akan ditanggung oleh *juragan*, selama hal tersebut bukan akibat kelalaian *belah*.

#### **B. Sistem *Profit Sharing* Yang Dilakukan Masyarakat Nelayan Di Desa Campurejo Ditinjau Dari Akad *Mudārabah***

Masyarakat nelayan di Desa Campurejo melakukan kerjasama pembagian hasil melaut yang melibatkan dua jenis nelayan, yaitu nelayan juragan dan nelayan belah. Pembagian hasil melaut dilakukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak. Saat juragan dan belah melakukan perjanjian kerjasama, yang dibahas dalam perjanjian tersebut

yakni mengenai *job description*, hak dan kewajiban nelayan, dan persentase pembagian hasil. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo dilakukan secara lisan sesuai adat setempat.

Perjanjian dalam ekonomi islam disebut *akad*. Salah satu bentuk *akad* kerjasama dalam ekonomi islam yaitu *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah *akad* kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak lainnya akan menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal jika kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola.

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo dapat dikategorikan dalam akad *muḍārabah*, lebih tepatnya *muḍārabah muḡayyadah*. Dimana juragan bertindak sebagai *ṣāhibul māl* dan belah bertindak sebagai *muḍārib*. Juragan menyediakan perahu beserta alat tangkapnya dan pembekalan untuk melaut. Modal yang diberikan oleh juragan selaku *ṣāhibul māl* hanya boleh digunakan untuk melaut, bukan untuk usaha lainya. Belah bertugas untuk bekerja menangkap ikan di laut. Bagi hasil dilakukan setelah semua hasil tangkapan terjual, kemudian dikurangi dengan biaya pembekalan dan perawatan, baru kemudian hasil bersih dibagi sesuai dengan persentase 50%:50% atau 40%:60%. Jika terjadi



antara modal untuk usaha dan laba atau keuntungan dari usaha yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai kesepakatan, dan modal tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad. Sedangkan tenaga yang diserahkan berupa keahlian dan keterampilan untuk mengelola modal.

*Juragan* bermodalkan perahu, mesin, dan alat tangkap. Saat melaut *juragan* juga yang memberi modal untuk biaya pembekalannya. Modal yang dikeluarkan *juragan* juga jelas nomilanya. Sekali melaut biasa mengeluarkan modal Rp. 60.000 samapai Rp. 300.000. Sedangkan *belah* bermodalkan tenaga dan kemampuan mengoperasikan alat tangkap untuk mencari ikan.

Menurut pendapat Hambali yang dirajihkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, pemilik modal (*sāhibul mā*) juga diperbolehkan untuk ikut terjun dalam mengelola usaha mudharabah dan labah dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

*Juragan* biasa ikut melaut dengan para *belah*. *Juragan* yang akan mengemudikan perahu. Sedangkan *belah* yang bertugas mencari ikan dengan mengikuti arahan dari *juragan*.

### 3) Syarat ijab dan kabul (*sighat*)

Ijab dan qabul harus dilakukan secara sadar dan suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun oleh kedua pihak yang berakad. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.

Perjanjian kerjasama antara *juragan* dan *belah* di Desa Campurejo biasanya hanya dilakukan secara lisan masih mengikuti adat istiadat setempat, tidak ada kontrak maupun bukti tertulis apapun. Jadi ijab dan kabul yang dilakukan ialah dilakukan secara lisan dengan sadar dan dan suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun.

4) Syarat keuntungan (*nisbah*)

Nisbah bagi hasil dari *mudārabah* harus jelas persentasenya, misalnya 50%:50%, 60%:40% atau 70%:30% sesuai yang disepakati kedua belah pihak. Pembagian keuntungan baru dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahibul maal*.

Perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh *juragan* dan *belah* didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pembekalan untuk melaut dan dipotong 10% untuk biaya perawatan. Penjualan hasil melaut dilakukan langsung setelah perahu menepi, biasanya dilakukan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang berlokasi di dekat laut tempat perahu-perahu nelayan berada. Saat melakukan transaksi penjualan hasil melaut hanya pihak *juragan* yang melakukan dan menyaksikannya. Sementara pihak *belah* kembali ke rumah untuk membersihkan diri, setelah itu baru kembali lagi ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) atau ke rumah *juragan*. *Belah* tidak pernah menyaksikan transaksi penjualan hasil melaut, tetapi selama ini mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut, mengingat hal tersebut sudah



biasa dilakukan di sana dan sesuai dengan adat setempat. Setelah itu uang hasil penjualan akan dipotong terlebih dahulu untuk keperluan yang digunakan saat melaut, yaitu pembekalan yang sudah disebutkan di atas, dan dipotong sebesar 10% untuk biaya perawatan. Setelah didapatkan hasil bersih, kemudian dibagi untuk kedua pihak, bisa 50:50 untuk pihak juragan 50% dan untuk pihak belah 50% atau 40:60 untuk pihak belah 40% dan untuk pihak juragan 60%. Bagian yang diperoleh pihak belah kemudian dibagi lagi sesuai dengan jumlah belah yang ikut melaut saat itu.

Jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya *akad muḍārabah*, kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat nelayan di Desa Campurejo sudah memenuhi semua rukun dan syaratnya. *Juragan* sebagai *ṣāhibul māl* dan *belah* sebagai *muḍārib* merupakan orang dewasa yang sudah cakap hukum. *Juragan* menyediakan perahu, alat tangkap dan pembekalan untuk melaut sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan *belah* memberikan tenaganya berupa keahlian menangkap ikan dan mengoperasikan perahu sebagai objek *muḍārabah*. Untuk ijab kabul dilakukan secara lisan sesuai adat setempat oleh *juragan* dan *belah* secara suka rela. Nisbah atau pembagian hasil melaut yang disepakati oleh *juragan* dan *belah* pada awal perjanjian jelas persentasenya, sebagian besar masyarakat nelayan di Desa Campurejo menggunakan 50%:50% dan ada sebagian juga memakai 40%:60% (40% *belah* 50% *juragan*).

Dalam sistem bagi hasil terdapat prinsip-prinsip yang menjalankan aktivitasnya yaitu:

- a. Prinsip keadilan dan kehati-hatian tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara pemodal dengan pengelola kemudian pengelola akan mengembangkan dana dari pemodal untuk usaha-usaha yang baik secara professional.

Dalam pelaksanaannya sistem *profit sharing* yang diterapkan oleh masyarakat nelayan di Desa Campurejo sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian. Pembagian persentase bagi hasil yang digunakan yaitu 50:50 atau 60:40 dan sudah disepakati oleh kedua pihak, hal tersebut sesuai dengan prinsip keadilan. Nelayan *juragan* dalam memilih *belah* mendahulukan orang terdekat, seperti keluarga atau orang yang sudah dikenalnya dan dianggap baik, hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian agar modal yang ada dapat dikelola dengan baik.

- b. Prinsip Kesederajatan, dimana menempatkan pemodal dan pengelola pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara pemodal dan pengelola.

Kerjasama masyarakat nelayan di Desa Campurejo dengan menggunakan *profit sharing* tidak membeda-bedakan antara nelayan *juragan* dan nelayan *belah*. Hak dan kewajiban yang dimiliki masing-

masing pihak berimbang sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya. Jadi sistem bagi hasil yang digunakan dalam kerjasama masyarakat nelayan tersebut sesuai dengan prinsip kesederajatan.

- c. Prinsip Ketentraman, sistem bagi hasil yang telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba. Dengan demikian, pemodal dan pengelola akan merasa ketentraman lahir maupun batin.

Penerapan *profit sharing* yang pada nelayan juragan dan nelayan belah di Desa Campurejo sudah baik dalam akad kerjasamanya walaupun kerjasama yang dilakukan hanya sekedar dengan perjanjian lisan, tidak ada bukti tertulis yang menjelaskan isi kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh juragan dan nelayan dalam menjalankan kegiatan kerjasama sistem bagi hasil bersama. Maka adanya akad perjanjian tertulis akan lebih baik lagi dari pada secara lisan, karena menguatkan secara hukum di Indonesia. Adanya bukti tertulis juga akan menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak *juragan* dengan adanya perjanjian tersebut yaitu nelayan *belah* yang bekerjasama dengannya tidak bisa seenaknya memutuskan untuk pindah ke *juragan* lain. Pihak *belah* juga akan diuntungkan, *juragan* tidak bisa dengan gampangnya memutus kerjasama secara sepihak.

Saat melakukan transaksi penjualan hasil melaut seharusnya disaksikan oleh semua pihak, baik pihak *juragan* maupun pihak *belah*.















